

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM,  
PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012-2020**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Salma Labita Zenritami  
145020100111047**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2021**

# **ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PAJAK DAERAH, dan RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH dan PERTUMBUHAN EKONOMI di PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012-2020**

**Salma L. Zenritami, Moh. Khusaini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: salmalabita150698@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang meliputi 9 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 – 2020. Variabel independen dari penelitian ini adalah DAU ( $X_1$ ), pajak daerah ( $X_2$ ), dan retribusi daerah ( $X_3$ ), sedangkan pertumbuhan ekonomi ( $Z$ ) merupakan variabel dependen dan belanja daerah ( $Y$ ) merupakan variabel antara. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis jalur dengan bantuan program SPSS. Dengan menggunakan analisis jalur, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, pajak daerah, retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Pengaruh tidak langsung terdapat pada semua variabel independen yaitu DAU, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening. Artinya ketika terdapat peningkatan DAU, pajak daerah, dan retribusi daerah maka akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur melalui variabel belanja daerah.*

*Kata kunci: Kalimantan Timur, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Memasuki abad ke-21, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tujuan utama dilakukannya kegiatan ekonomi. Negara memiliki misi untuk berlomba- menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi di dunia, sama halnya dengan Negara Indonesia. Menurut Todaro dan Smith (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai mekanisme yang memunculkan situasi dimana terjadi peningkatan nilai ekonomi dari sisi produksi secara berkesinambungan dari suatu periode yang berimplikasi pada penambahan tingkat pendapatan secara nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berusaha agar antar daerah saling terintegrasi yang diharapkan mampu menjangkau pembangunan di semua wilayah dari Indonesia dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan setiap daerah mampu memberikan kontribusi perekonomian yang kuat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang dimaksud, pihak pusat mendelegasikan sejumlah kewenangan yang ditujukan melalui pemerintah daerah dalam rangka mengatur daerahnya secara mandiri termasuk perekonomian melalui otonomi daerah termasuk kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya sendiri melalui APBD. Diharapkan melalui adanya kewenangan ini, pemerintahan daerah khususnya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur bisa memaksimalkan potensi keuangan dari berbagai lini/ sumber yang mampu membantu pemenuhan biaya dan kebutuhan di daerah (Setiaji & Adi, 2007).

APBD sendiri diterjemahkan sebagai dokumen yang memuat perencanaan keuangan dalam periode tahunan oleh pemerintahan daerah yang sebelumnya telah dirumuskan serta diberikan persetujuan secara kolektif oleh pemerintah daerah serta DPRD, dan secara legal ditetapkan melalui adanya peraturan daerah (Perda). Di dalam APBD terdapat 3 komponen penting yang tersusun atas pendapatan (penerimaan) daerah yang di dalamnya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), pembiayaan daerah, serta belanja daerah. Menurut skema APBD, PAD merupakan sumber pendapatan baru yang diserahkan kepada pemerintah daerah hanya setelah ditetapkannya otonomi daerah, termasuk dalam mengelola pajak daerah serta retribusi daerah. Sumber pendapatan itulah yang seharusnya diupayakan sebagai sumber pokok dari pembangunan suatu daerah sehingga tidak bergantung melalui adanya dana perimbangan oleh pusat.

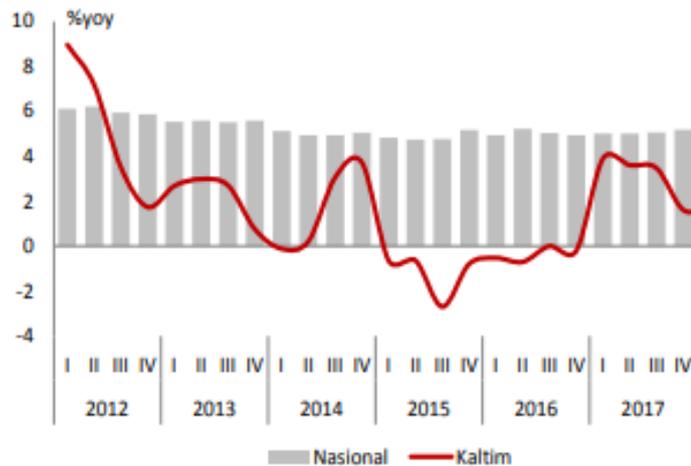
Selain itu ada pula belanja daerah yang merupakan salah satu faktor penentu dari adanya suatu pertumbuhan dalam ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada kapasitas, ukuran belanja, dan efektifitas pemakaian dari pembelanjaan modal dalam pembangunan tersebut (Sharma, 2012). Dibutuhkan rangkaian upaya untuk memberi peningkatan atas independensi daerah seperti menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, seperti dengan cara memilah mana saja sektor-sektor produktif di daerah tersebut, kemudian diberi alokasi anggaran belanja daerah yang lebih tinggi dibanding sektor lainnya. Tidak terkecuali untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selalu dituntut untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi sumber – sumber pendapatan daerah agar dapat membiayai belanja daerahnya untuk sektor yang produktif sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi daerah nya.

Provinsi Kalimantan Timur sendiri dikenal di Indonesia dengan predikat provinsi terluas dibawah provinsi Papua. Sesuai dengan data realisasi apbd seluruh provinsi di Kalimantan, Kaltim merupakan provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi tahun 2016. Jumlah PAD Kaltim pada tahun 2016 mencapai Rp4.029.364.843.886, disusul Kalimantan Selatan dengan jumlah PAD Rp2.500.073.656.774, lalu Kalimantan Utara Rp2.332.986.748.692, kemudian Kalimantan Barat dengan jumlah PAD Rp1.664.338.991.973, dan yang terakhir adalah Kalimantan Tengah dengan jumlah PAD Rp1.158.303.928.014 (DJPk Kemenkeu, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur sendiri memiliki 4 komponen, yakni retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Merujuk pada PPID Kaltim (2020) tentang realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 – 2020 bisa diketahui jika penyumbang terbesar realisasi PAD Kaltim mulai tahun 2012 hingga 2020 adalah pajak daerah, sedangkan retribusi daerah ialah penyumbang PAD terkecil bagi Kaltim. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah ialah salah satu dari bagian strategis dari penyusun PAD Kaltim, sedangkan retribusi daerah yang seharusnya menjadi salah satu sumber PAD penting Kaltim terlihat tidak memberikan kontribusi besar bagi PAD Kaltim. Melihat fenomena tersebut, seharusnya Pemerintah Kalimantan Timur mulai mencanangkan dan melakukan penggalan atas sejumlah potensi pendapatan daerah lainnya.

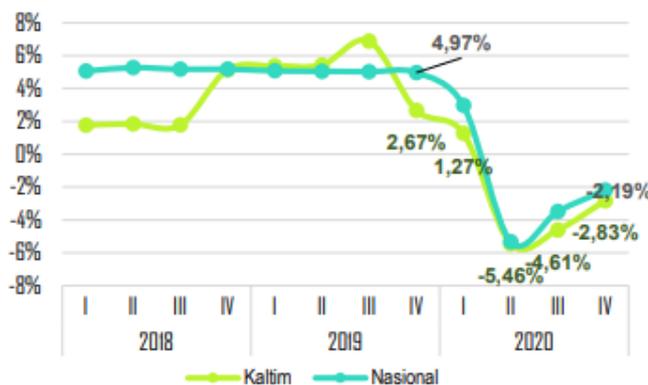
Namun dibalik melimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki dan nominal daripada PAD yang didapat, Provinsi Kalimantan Timur terbilang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung rendah jika dilakukan komparasi dengan rerata pertumbuhan ekonomi di lingkup nasional.

### **Gambar 1.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2012-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018, data diolah

**Gambar 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur dan Nasional tahun 2018-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021, data diolah

Merujuk pada gambar 1.1 dan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa mulai tahun 2012 tepatnya pada kuartal 2 hingga tahun 2017 kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah rata – rata pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan ketika tahun 2015 terjadi perlambatan ekonomi sebesar -1,2 persen dan turun menjadi -0,36 persen pada tahun 2016. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018, perlambatan tersebut terjadi akibat penurunan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian selama periode waktu tersebut. Akan tetapi, pada kuartal ketiga dan kuartal keempat di tahun 2020 perekonomian Kalimantan Timur berangsur membaik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keselarasan diantara daerah dengan pihak pusat dalam rangka melakukan penjagaan atas adanya dampak sosial-ekonomi yang menyertai kehadiran pandemi. Akan tetapi, adanya stimulus ini pun belum mampu membuat Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Terlepas dari permasalahan pandemi yang dihadapi dunia termasuk negara Indonesia khususnya Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, tidak dipungkiri bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2012 hingga 2020 terbilang cukup rendah dan berada di bawah rata – rata pertumbuhan nasional. Padahal menurut BAPPEDA Kaltim (2017), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat menjadi penyumbang devisa negara tertinggi terutama di sektor pertambangan. Seharusnya penerimaan PAD di Kota

Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah mampu diandalkan sebagai sumber pendapatan krusial karena dengan adanya hasil pertambangan yang tinggi maka disitu ada pungutan pajak yang tinggi pula, sehingga dapat meningkatkan belanja daerah agar dialokasikan untuk sektor produktif yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki bentuk tujuan dalam rangka memberi analisis terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020 melalui Belanja Daerah.

## **B TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pajak Daerah**

Menurut Khusaini (2018), pajak daerah dipaparkan sebagai sejumlah iuran yang dikeluarkan oleh individu ataupun organisasi kepada daerah dimana tidak didapatkan imbalan yang langsung tampak namun dipakai dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan, pajak secara legal telah diberikan ketetapan melalui regulasi yang mengikat. Ketika dikomparasikan antar susunan dalam PAD lain, maka dipahami jika pajak daerah ialah salah satu komponen penting yang memiliki potensi pungutan lebih banyak apabila digali secara maksimal. Pajak daerah memiliki 2 fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*).

Berdasarkan Model Pertumbuhan Harrod-Domar, pajak daerah dapat masuk sebagai komponen rasio tabungan neto yaitu bagian pendapatan yang disisihkan. Dalam teori ini dijelaskan, apabila tidak dijelaskan keterlibatan aktor pemerintah, akan berimplikasi pada nilai positif dari level pertumbuhan dari pendapatan nasional dan berkorelasi pada rasio tabungan serta memiliki kebalikan perbandingan atas rasio modal-output dari perekonomian. Artinya besaran penerimaan pajak daerah yang dapat ditabung maka memperbesar pertumbuhan PDRB dan semakin besar modal-output yang diperlukan maka semakin rendah pula pertumbuhan GDP (Todaro & Smith, 2011).

### **B. Retribusi Daerah**

Komponen penting selanjutnya dalam PAD adalah Retribusi Daerah. Menurut Khusaini (2018), retribusi daerah diterjemahkan sebagai bentuk iuran atas dasar pemaksaan oleh daerah yang dilakukan masyarakat dengan mengharap pengembalian prestasinya langsung. Menurut Kemenkeu (2018) Retribusi daerah ialah bentuk dari iuran yang diberikan dari masyarakat untuk daerah Retribusi daerah sendiri merupakan bentuk partisipasi bayar dari masyarakat atas sejumlah pelayanan di daerah yang secara langsung bisa diterima ataupun dalam penerimaan izin yang diberikan. Pembeda dari pajak yang bercirikan tidak diperolehnya manfaat langsung, adalah adanya sejumlah pelayanan yang disajikan dan jasa perizinan yang disuguhkan dari daerah. Terdapat 3 golongan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Khusaini, 2018).

Merujuk pada teori Sollow dan Swan, retribusi daerah merupakan bagian dari instrumen produksi yaitu akumulasi dari modal. Jika terdapat peningkatan dari

penerimaan retribusi output yang diwujudkan melalui adanya jasa beserta barang yang menjadi produk (PDRB) akan meningkat pula, dengan alasan jika retribusi daerah dimanfaatkan sebagai pembiayaan modal dalam rangka memberi output tersebut. Namun, teori tersebut nyatanya tidak sesuai dengan realita yang ada di beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan data dari BPS, jumlah nominal retribusi daerah cenderung menurun, sedangkan PDRB terus meningkat. Realisasi yang turun dari retribusi daerah bisa pula dilatar belakangi atas minimnya pihak daerah dalam tindakan proaktif ketika memungut kewajiban pada retribusi daerah (Mankiw, 2006).

### **C. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah salah satu dari pembagian dana yang menyusun dana perimbangan berupa transfer dana oleh pusat menuju ke pemerintah daerah dengan asal mengambil dari pendapatan APBN. DAU sendiri bertujuan sebagai pemerata kapabilitas sektor keuangan di tiap daerah dalam pembiayaan kebutuhan untuk pengeluaran di kerangka desentralisasi. DAU pada umumnya dijadikan alokasi bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan minimum persentase berjumlah 25% dari penerimaan dalam negeri yang telah disahkan di dokumen APBN tiap tahunnya.

Untuk menentukan besaran DAU yang dibutuhkan, dapat dihitung melalui rumus formula perhitungan DAU. Rumus ini memakai jenis pendekatan yang dikenal dengan istilah celah fiskal (*fiscal gap*) dimana operasinya dilakukan dengan melihat selisih pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang dikurangi oleh aspek kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dari daerah dan Alokasi Dasar (AD) yang diwujudkan oleh total besaran dari gaji PNS daerah (DJPk Kemenkeu, 2016). Semakin tinggi DAU suatu provinsi dan kabupaten/kota, maka memicu tingginya nilai belanja daerah di wilayah tersebut yang mengakibatkan perputaran produktivitas barang maupun jasa yang meningkatkan PDRB di wilayah tersebut. Maka diambil simpulan jika bahwa DAU memiliki pengaruh secara positif pada PDRB.

### **D. Belanja Daerah**

Belanja daerah ialah segala bentuk dari pengeluaran yang bersumber melalui adanya Rekening Kas Umum Daerah yang berdampak pada berkurangnya kekayaan pemerintah daerah di jangka waktu setahun pada anggaran. Belanja daerah dapat dipetakan melalui klasifikasi organisasi, kemudian fungsi, serta jenis belanja. Belanja dari prespektif organisasi adalah integrasi dari penggunaan anggaran seperti Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis, Dinas Daerah dan lainnya. Fungsi daripada belanja ialah pada bidang kesehatan, pendidikan, dan fungsi yang lain. Jenis dari belanja yakni berupa belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal/pembangunan (Widjaja, 2014).

Teori Keynes yang menjelaskan jika dari total pendapatan segi perekonomian ditinjau dari jangka yang pendek, dipengaruhi penuh lewat adanya keinginan bagi rumah tangga, perusahaan beserta pemerintah dalam melakukan belanja dari pendapatan. Adanya kenaikan belanja pemerintah pada sektor produktif maka akan menstimulus perekonomian di daerah tersebut, selain itu belanja yang di alokasikan untuk sektor produktif akan menghasilkan multiplier effect yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006).

### **E. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi ialah proses dari naiknya kapasitas dari produksi komoditas ekonomi yang dituangkan melalui adanya pendapatan nasional yang naik (Khusaini, 2018). Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan pada output perkapita di periode lama (Boediono, 1999). Definisi diatas memuat tiga penyusun utama yakni berupa, proses, output per kapita serta untuk jangka yang panjang. Selain itu

pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai ukuran dari sebuah kegiatan pembangunan dengan alasan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu untuk menjadi ukuran atas level perkembangan daripada program ekonomi dalam sistem perekonomian secara menyeluruh (Hasan, 2012). Indikator penting untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

#### **F. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah menurut Keynes**

Di dalam *The General Theory* Keynes dibahas mengenai keterkaitan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menjelaskan jika komponen dari pendapatan total perekonomian di periode terbatas, dipengaruhi atas adanya keinginan dari rumah tangga, individu, korporasi, serta pemerintah dalam anggaran belanjanya. Adanya penambahan pada belanja pemerintah akan mendorong adanya kenaikan pendapatan yang lebih besar. Saat munculnya fenomena belanja pemerintah yang naik dan pendapatan yang meningkat, berdampak lurus pada konsumsi, yang kemudian meningkatkan pendapatan, dan seterusnya (Mankiw, 2006).

#### **G. Model Pertumbuhan Harrod-Domar**

Model Pertumbuhan dari Harrod-Domar mengembangkan teori Keynes, bahwa harus ada penanaman modal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Model ini menjelaskan tentang korelasi dari fungsional ekonomi yang menegaskan jika level dari pertumbuhan PDB tergantung atas tabungan di lingkup nasional yang secara langsung ditinjau melalui rasio neto dan memiliki komparasi yang berlawanan terhadap rasio modal-output di lingkup nasional. Rasio tabungan neto didefinisikan sebagai tabungan yang diwujudkan melalui sejumlah pendapatan yang telah dialokasikan khusus di sebuah waktu. Sedangkan rasio dari modal-output ialah bentuk rasio yang menjelaskan adanya total dari modal yang dibutuhkan dalam rangka memberi suatu jumlah atas produk di lingkup periode khusus. Dalam teori ini dijelaskan, GDP yang jumlahnya tinggi bisa dijadikan tabungan dan di investasikan, maka akan meningkatkan suatu pertumbuhan GDP dan semakin besar modal-output yang diperlukan maka semakin rendah pula pertumbuhan GDP (Todaro & Smith, 2011).

#### **H. Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Menurut pemikiran dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional, terdapat unsur wilayah di dalamnya. Wilayah tersebut adalah provinsi, kabupaten atau kota. Tiap wilayah pasti memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, karena terdapat perbedaan potensi antar wilayah sehingga kebijakan yang ditentukan juga disesuaikan dengan potensi di setiap wilayah. Ada sejumlah faktor yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi secara regional, antara lain:

1. Tanah beserta kekayaan alam
2. Besaran dari penduduk serta angkatan kerja termasuk mutu
3. Barang-barang yang dijadikan modal
4. Level penguasaan teknologi
5. Sistem jaringan sosial dan sikap dari lingkungan

Jika pertumbuhan ekonomi nasional diukur oleh PDB, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat diperkirakan lewat adanya Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB sendiri didefinisikan sebagai total dari nilai yang menjadi tambahan keseluruhan dari unit di sebuah daerah khusus, namun juga dijelaskan dalam total nilai dari jasa maupun barang yang menjadi hasil dari keseluruhan ekonomi di sebuah wilayah. PDRB dapat dihitung dengan 2 metode, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

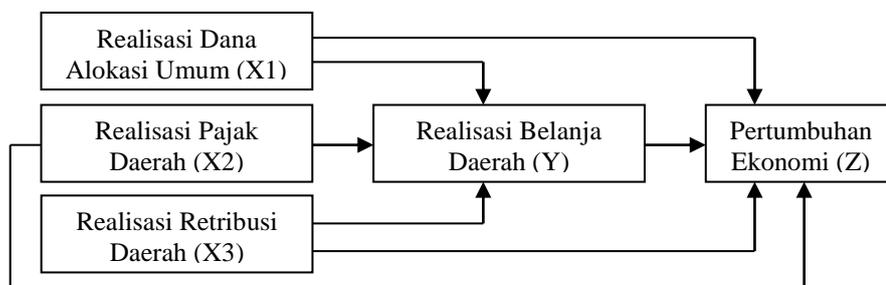
### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis pengaruh variabel DAU, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur maka digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan aplikasi computer yaitu SPSS. Dalam penelitian ini DAU ( $X_1$ ), pajak daerah ( $X_2$ ), retribusi daerah ( $X_3$ ) berperan sebagai variabel dependen, belanja daerah ( $Y$ ) berperan sebagai variabel *intervening*, dan terakhir pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel dependen ( $Z$ ).

### Metode Analisis

Penelitian ini memilih memakai analisis dengan metode uji asumsi klasik serta analisis jalur (path analysis) yakni berupa metode yang dipilih dalam rangka melihat besaran dari sebuah pengaruh variabel yang bersifat independen kepada variabel dependen. Analisis Jalur (*Path Analysis*) digunakan melihat kehadiran suatu pengaruh baik langsung maupun tidak, secara kolektif maupun sendiri, dalam hubungannya antara variabel sebab-akibat. Apabila terdapat prasyarat variabel yang sudah diuji tidak sesuai dengan kriteria dari variabel maka akan disingkirkan dan tidak terpakai (Abdurahman & Muhidin, 2007). Adapun model analisis jalur penelitian ini yang memiliki 3 persamaan substruktur yaitu :

**Gambar 3.1 Metode Analisis Jalur/Path Analysis**



Sumber : Penulis 2018

### Substruktur 1 Model Analisis Jalur/Path Analysis

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

- Y = Realisasi Penerimaan Belanja Daerah (Jutaan Rupiah)
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien masing – masing variabel independen
- $X_1$  = Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) (Jutaan Rupiah)
- $X_2$  = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Jutaan Rupiah)
- $X_3$  = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Jutaan Rupiah)

### Substruktur 2 Model Analisis Jalur/Path Analysis

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

- Z = Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien masing – masing variabel independen
- $X_1$  = Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) (Jutaan Rupiah)
- $X_2$  = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Jutaan Rupiah)
- $X_3$  = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Jutaan Rupiah)

### Substruktur 3 Model Analisis Jalur/*Path Analysis*

$$Z = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + u \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

- Z = Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien variabel *intervening*
- $Y_1$  = Realisasi Penerimaan Belanja Daerah (Jutaan Rupiah)

## D. PEMBAHASAN

### A. Hasil Analisis Jalur / *Path Analysis*

Dalam rangka menyelidiki keberadaan dari pengaruh secara langsung maupun tidak bisa diketahui melalui nilai dari *standardized coefficients* regresi dengan tiap nilai variabel independen kepada variabel dependen diilustrasikan melalui tabel analisis jalur di bawah ini:

**Tabel 4.1 Model Jalur Substruktur Pertama**

Variabel	<i>Standardized Coefficients</i>	t-Statistic	Sig.
DAU ( $X_1$ )	0.333	1.046	0.009
Pajak Daerah ( $X_2$ )	0.247	0.205	0.038
Retribusi Daerah ( $X_3$ )	0.429	0.532	0.046
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	0,623		

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.2 Model Jalur Substruktur Kedua**

Variabel	<i>Standardized Coefficients</i>	t-Statistic	Sig.
DAU ( $X_1$ )	0.151	2.068	0,042
Pajak Daerah ( $X_2$ )	0.172	1.239	0,019
Retribusi Daerah ( $X_3$ )	0.075	1.184	0,040
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	0,567		

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.3 Model Jalur Substruktur Ketiga**

Variabel	<i>Standardized Coefficients</i>	t-Statistic	Sig.
Belanja Daerah (Y)	0.743	0.383	0.003
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	0,311		

Sumber : Data diolah

Merujuk pada nilai yang dihasilkan oleh Tabel 4.1 didapati suatu model persamaan analisis jalur substruktur pertama dengan hasil yaitu :

$$Y = 0,333 X_1 + 0,247 X_2 + 0,429 X_3 + u \dots (1)$$

Menurut adanya persamaan regresi yang disajikan di atas termuat beberapa informasi yakni:

1. Nilai dari koefisien jalur DAU mencapai angka 0,333 sehingga dipahami bahwasanya tingginya dana transfer yang diberi pihak pemerintah pusat melalui skema DAU akan berdampak pada peningkatan total nilai yang diperlukan dalam pengeluaran (belanja daerah).
2. Nilai dari koefisien jalur pajak daerah ialah 0,247 sehingga tingginya pendapatan yang diterima melalui pajak daerah maka akan berkorelasi dengan adanya peningkatan dari jumlah pengeluaran dari adanya belanja daerah.
3. Nilai dari koefisien jalur retribusi daerah yakni 0,429 artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima dalam bentuk retribusi daerah maka akan berimplikasi pada besarnya pengeluaran yang di total melalui bentuk belanja daerah.
4. Nilai dari *Adjusted R*<sup>2</sup> = 0,623. Mengisyaratkan jika kontribusi pengaruh dari X1, X2 dan X3 terhadap Y sejumlah 62,3% dengan sisa nilai adalah 37,7% yang dikenal sebagai kontribusi dari sejumlah variabel di luar aspek yang diteliti atau dapat pula dari nilai error.

Merujuk pada nilai yang dihasilkan oleh Tabel 4.2 didapati suatu model persamaan analisis jalur substruktur kedua dengan hasil yaitu :

$$Z = 0,151 X_1 + 0,172 X_2 + 0,075 X_3 + u \dots (2)$$

Menurut adanya persamaan regresi yang disajikan di atas termuat beberapa informasi yakni:

1. Nilai dari koefisien jalur DAU sejumlah 0,151 yang bisa diterjemahkan jika dana yang ditransfer yang tinggi melalui wewenang pemerintah pusat dan diwujudkan melalui DAU maka akan berdampak pada peningkatan aspek pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Nilai dari koefisien jalur pajak daerah sebesar 0,172 sehingga tingginya pendapatan yang diterima dalam bentuk pajak daerah maka dapat memperbesar nilai dari pertumbuhan ekonomi daerah
3. Nilai koefisien jalur retribusi daerah sebesar 0,075 sehingga nilai pendapatan tinggi yang diterima dalam bentuk retribusi daerah maka akan mendorong peningkatan atas pertumbuhan ekonomi pada daerah.
4. Nilai *Adjusted R*<sup>2</sup> = 0,567 tergolong besar. Dijelaskan jika kontribusi dari pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Z yakni sejumlah 56,7% dengan sisa sejumlah 43,3% yang dikategorikan sebagai kontribusi sejumlah variabel di luar aspek yang diteliti atau dapat pula dari nilai error.

Merujuk pada nilai yang dihasilkan oleh Tabel 4.3 didapati suatu model persamaan analisis jalur substruktur ketiga dengan hasil yaitu :

$$Z = 0,743 Y + u \dots (3)$$

Menurut adanya persamaan regresi yang disajikan di atas termuat beberapa informasi yakni:

1. Nilai dari koefisien jalur Belanja Daerah adalah sejumlah 0,743 dengan maksud bahwa tingginya dana yang telah diberikan dari pemerintah pusat melalui pengadaan DAU akan berbanding lurus dengan besarnya pengeluaran dari anggaran belanja daerah.
2. Skor *Adjusted R*<sup>2</sup> = 0,311 yang mengisyaratkan jika kontribusi pengaruh Y terhadap Z adalah 31,1% dengan nilai sisa adalah 68,9% dikategorikan sebagai kontribusi sejumlah variabel di luar aspek yang diteliti atau dapat pula dari nilai error.

## B. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis untuk substruktural pertama, kedua dan ketiga dapat diketahui melalui tabel 4.4 hingga tabel 4.6 yaitu :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis Substruktural Pertama**

Variabel	Standarized Coefficients	t-Statistic	Sig.
DAU	0.333	1.046	0.009
Pajak Daerah	0.247	0.205	0.038
Retribusi Daerah	0.429	0.532	0.046
F-Statistic	0,392		0,009
Adjusted R <sup>2</sup>	0,623		

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis Substruktural Kedua**

Variabel	Standarized Coefficients	t-Statistic	Sig.
DAU	0.151	2.068	0,042
Pajak Daerah	0.172	1.239	0,019
Retribusi Daerah	0.075	1.184	0,040
F-Statistic	2,915		0,000
Adjusted R <sup>2</sup>	0,567		

Sumber : Data diolah

**Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis Substruktural Ketiga**

Variabel	Standarized Coefficients	t-Statistic	Sig.
Belanja Daerah	0.743	0.383	0.003
F-Statistic	0,146		0,000
Adjusted R <sup>2</sup>	0,311		

Sumber : Data diolah

## Uji T

Pada substruktural pertama, ketiga variabel memiliki nilai signifikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan 0,05 sehingga nilai dari variabel DAU, pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pada substruktural kedua, ketiga variabel memiliki nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 sehingga variabel DAU, pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada substruktural ketiga, variabel belanja daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 sehingga variabel belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Uji F

Pada substruktural pertama, permodelan regresi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,009 sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada substruktural kedua, permodelan regresi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada substruktural ketiga, permodelan regresi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bagian awal artikel antara lain berisi: judul, nama penulis, insitusi (afiliasi) penulis, email.

### **C. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Menurut luaran dari penelitian diperoleh hasil jika dana alokasi umum berpengaruh secara positif signifikan kepada belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Keadaan yang dimaksudkan dapat dipahami sebagai keselarasan dari adanya DAU dengan belanja daerah (apabila dananya tinggi maka akan meningkat). Hasil dari pembahasan sejalan dengan penelitian Handayani (2012), Tuasikal (2008) dimana ditemukan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum ialah salah satu dari unsur yang membentuk susunan dana perimbangan yang merupakan bentuk bantuan transfer oleh pusat kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. DAU ialah jenis transfer yang diberikan untuk pihak daerah dengan mengesampingkan adanya pengeluaran yang sifatnya khusus (Awaniz, 2011). DAU berfungsi untuk menambal kekurangan dari biaya kebutuhan daerah akibat tidak termaksimalkannya potensi yang tersedia (Ferdiansyah et al., 2018). DAU yang diberikan dapat dimaknai sebagai pendelegasian suatu wewenang menuju daerah dengan bentuk keleluasaan pemanfaatan DAU untuk disalurkan melalui sejumlah program yang menarik dengan alokasi yang diserahkan kepada daerah serta adanya suatu pemanfaatan secara optimal sehingga DAU dapat meningkatkan belanja daerah. Besaran dari DAU yang tinggi merupakan indikasi adanya konsep desentralisasi fiskal dengan implementasi yang baik melalui indikator peningkatan kesejahteraan dari masyarakat dengan adanya DAU dan pengeluaran di daerah (Lestari et al., 2016).

Pengalokasian nilai dari DAU diberikan kepada daerah melalui adanya prioritas kebutuhan yang telah disusun secara matang dalam orientasinya untuk melayani masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Mayoritas alokasi dari DAU disalurkan untuk pembayaran gaji dari pegawai daerah. Belanja daerah yang sebagian besar diberikan pada alokasi pelayanan serta program pekerjaan rumah daerah memicu adanya efisiensi anggaran. Hal tersebut diketahui dengan adanya optimalisasi pengerjaan proyek daerah oleh sejumlah pegawai di daerah sehingga mendorong peningkatan belanja dari daerah. Oleh karena itu, tingginya DAU dapat mengakibatkan tingginya belanja daerah (Iqbal et al., 2020).

### **D. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah**

Menurut hasil dari penelitian maka didapati suatu hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan pada belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Kondisi tersebut mengindikasikan jika adanya nilai yang tinggi pada pajak daerah, selanjutnya belanja daerah juga mengalami peningkatan. Hasil daripada penelitian ini sejalan dengan hasil riset oleh Handayani (2012) dimana pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pajak daerah dipaparkan sebagai sejumlah iuran yang dikeluarkan oleh individu ataupun organisasi kepada daerah dimana tidak didapatkan imbalan yang langsung tampak namun dipakai dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan, pajak secara legal telah diberikan ketetapan melalui regulasi yang mengikat. (Khusaini, 2018). Bila dikomparasikan dari adanya komponen dalam PAD lainnya, pajak daerah ialah contoh dari komponen strategis yang memiliki potensi

pungutan lebih banyak apabila digali secara maksimal. Hal tersebut didukung oleh adanya kebijakan dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan bentuk kontribusi secara wajib yang disalurkan untuk daerah dan secara sah dipaksakan kepada individu maupun badan atas landasan UU, dimana tidak didapati timbal balik nyata dan segera namun dialokasikan manfaatnya sebagai instrumen penyokong kemakmuran rakyat. Bisa dijelaskan bahwasanya penerimaan dari pajak daerah dipakai sebagai instrumen yang mampu membiayai kebutuhan dari masyarakat. Adapun anggaran belanja dari daerah yang memakai dana dari sumber pajak daerah ialah bentuk belanja yang berkorelasi dengan adanya program yang berorientasi pada kemakmuran di masyarakat yang meningkat (Melas, 2017).

#### **E. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah**

Menurut luaran dari penelitian diperoleh hasil jika retribusi daerah mendatangkan suatu pengaruh dengan muatan yang positif serta signifikan pada belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Keadaan yang dimaksudkan mempunyai indikasi jika tingginya suatu retribusi daerah, sebanding dengan meningkatnya belanja daerah. Hasil penelitian ini mengisyaratkan jika retribusi daerah akan memiliki pengaruh dari adanya belanja daerah. Perbedaan dari pajak dan retribusi yakni bahwa retribusi memiliki sifat atas balas jasa yang secara langsung bisa diperoleh oleh masyarakat melalui bentuk jasa dan produk yang dibutuhkan. Secara penuh, retribusi daerah bisa dipergunakan dalam rangka menambah nominal pemasukan untuk penggunaan anggaran belanja dari daerah. Retribusi daerah yang tinggi akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena retribusi daerah merupakan suatu ciri bagian atas PAD yang mana nominal dari PAD juga berimplikasi pada adanya belanja pemerintah daerah. Sehingga pengeluaran dari pemerintah daerah diselaraskan melalui adanya perubahan dari penerimaan daerah serta perubahan dari pendapatan sebelum terjadi perubahan dalam pengeluaran.

Pemungutan dari Retribusi daerah ditegaskan melalui adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang juga memuat terkait dengan pajak dari daerah. Retribusi daerah ialah bentuk dari iuran yang diberikan dari masyarakat untuk daerah. Retribusi daerah sendiri merupakan bentuk partisipasi bayar dari masyarakat atas sejumlah pelayanan di daerah yang secara langsung bisa diterima ataupun dalam penerimaan izin yang diberikan. Sama dengan adanya pajak daerah, retribusi juga menjadi bentuk penerimaan strategis dalam komponen PAD untuk dapat dilakukan alokasi untuk belanja daerah (Melas, 2017).

Peningkatan dari aspek pelayanan masyarakat bisa terjadi dengan prasyarat bahwasanya terdapat suatu pendapatan dari daerah yang nominalnya cukup. Walaupun dari pihak daerah memiliki bantuan dari pusat, namun tetap terdapat kewajiban bagi daerah untuk dapat melakukan optimalisasi potensinya dengan berbagai strategi, contohnya saja melalui adanya peningkatan retribusi sebagai komponen penyusun PAD. Peningkatan dari retribusi berbanding lurus dengan adanya alokasi pada belanja modal sehingga ada perbaikan dalam layanan publik (Simajuntak dan Ginting, 2019).

#### **F. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut hasil dari penelitian maka diperoleh hasil bahwa belanja daerah mempunyai nilai pengaruh yang positif signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Keadaan tersebut menjadi suatu indikasi dari tingginya belanja dari daerah, pertumbuhan ekonomi akan makin meningkat. Hasil dari penelitian memiliki keselarasan dengan riset dari Khusaini (2016) dimana pengeluaran sector publik memiliki pengaruh pada bertumbuhnya ekonomi.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan jika belanja daerah memiliki nilai pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan Teori Keynes yang

menjelaskan jika dalam jangka yang pendek, total dari nilai ekonomi dipengaruhi oleh adanya keinginan bagi rumah tangga, korporasi, serta pemerintah dalam rangka belanja dari hasil pendapatannya. Adanya kenaikan belanja pemerintah pada sektor produktif maka akan menstimulus perekonomian di daerah tersebut, selain itu belanja yang di alokasikan untuk sektor produktif akan menghasilkan multiplier effect yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja daerah melalui adanya beragam program yang dilakukan mulai dari adanya perbaikan serta pembangunan dari sejumlah sektor semisal melalui kesehatan, pendidikan, beserta transportasi akan berdampak pada kebermanfaatan di hidup masyarakat atas sejumlah pembangunan dari daerahnya yang bisa berkontribusi dalam keseluruhan dari perekonomian regional. Di periode yang lebih singkat yakni lewat adanya belanja material beserta penyerapan dari sektor tenaga kerja dan untuk periode yang lebih lama lewat adanya nilai yang memiliki nominal ganda dalam sektor swasta yang juga memiliki peranan di lingkup perekonomian. Munculnya sejumlah infrastruktur yang memadai diharapkan bisa berdampak pada penciptaan dari efisiensi serta efektifitas dari semua sektor, serta dari sisi masyarakat diharapkan akan semakin produktif sehingga pada waktunya nanti bisa merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan dengan wujud pelayanan publik memberikan stimulus kepada masyarakat sehingga bisa bersemangat lagi dalam melakukan pekerjaan dengan alasan adanya fasilitas yang mampu menunjang kinerja. Selain itu adanya ketersediaan infrastruktur secara baik akan memicu datangnya investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang penuh peluang. Pendapatan daerah juga akan terimbas dari adanya produktivitas serta kedatangan investor. PAD yang naik secara simultan juga memberi pengaruh kepada daerah dalam rangka peningkatan kualitas dari layanan publik, sehingga pada akhirnya akan ada peningkatan yang selaras diantara pendapatan per kapita dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut BAPPEDA Kaltim (2019), pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memang didominasi oleh hasil sumber daya alam yang melimpah terutama batubara dan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, namun memang penyediaan infrastrukturnya cenderung lambat, sehingga belanja daerah terkadang kurang tepat sasaran sesuai apa yang dibutuhkan. Perlunya belanja pada sektor infrastruktur ini diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah. Sehingga tercipta pemerataan aksesibilitas dan konektivitas antar sentra produksi.

Selain itu, hasil ini menjadi salah satu indikasi jika kebijakan fiskal lewat adanya APBD dari tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di beberapa sektor dari pengeluaran daerah bisa memacu pergerakan dari nilai ekonomi. Adapun pengeluaran yang mampu memberi peningkatan pada nilai ekonomi perlu memperhatikan sejumlah aspek, diantaranya oleh aspek asumsi jika pengeluaran dipergunakan dalam alokasi program produktif yang bisa memicu pengembangan aktivitas ekonomi (Taher dan Tuasela, 2019).

Pengeluaran dari pemerintah mempunyai peranan untuk menumbuhkan nilai dari ekonomi, dengan asumsi bahwa adanya pengaruh dari pengeluaran pemerintah dimaksudkan dengan adanya sejumlah kegiatan produktif misalnya saja dengan alokasi sektor infrastruktur. Ekonomi daerah bisa terstimulus oleh adanya belanja yang dilakukan secara produktif dan bersinggungan langsung dalam sejumlah program yang menyangkut kebutuhan publik. Contohnya adanya investasi pada bidang infrastruktur bisa meningkatkan laju dari investasi sehingga ada penyerapan lapangan pekerjaan dan memperkecil angka kemiskinan (Taher dan Tuasela, 2019).

### **G. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan maka didapati hasil jika DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Kondisi tersebut menjadi indikasi

bahwasanya tingginya nominal dari dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian ini sejalan riset dari Pujiati (2007), Simajuntak (2006) dimana DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun dalam hasil ini tidak sejalan pada penelitian dari Khusaini, et al. (2013) dimana ditemukan bahwa DAU berpengaruh dengan tidak signifikan pada aspek pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini selaras terhadap penelitian yang dilakukan Prakosa (2004) dimana terdapat keterkaitan cukup erat dengan adanya transfer Pemerintah Pusat pada belanja pemerintah daerah. Dengan adanya hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja maka terdapat pula pengaruh dan hubungan dana alokasi umum terhadap PDRB dengan tak langsung. Semakin tinggi DAU suatu provinsi dan kabupaten/kota, selaras dengan tingginya belanja daerah di wilayah tersebut yang mengakibatkan perputaran produktivitas barang maupun jasa yang meningkatkan PDRB di wilayah tersebut.

Skema DAU lewat pemberian dari pusat dalam kerangka APBN telah disesuaikan dengan aturan yang selanjutnya dilakukan alokasi melalui maksud terciptanya keuangan yang merata di semua daerah sehingga cita-cita otonomi daerah bisa terimplementasikan dengan baik. Dana alokasi umum oleh pemerintah daerah perlu untuk diambil manfaatnya yang disalurkan melalui berbagai kebutuhan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tetap berpedoman pada keberlanjutan desentralisasi dari pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan dari pembahasan yakni adanya DAU perlu untuk dimanfaatkan secara baik sehingga berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

DAU memiliki suatu pengaruh yang kuat pada aspek pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kesadaran jika DAU mendominasi pembiayaan kebutuhan dari belanja daerah. DAU yang telah diterima oleh pemerintah daerah pada tiap anggarannya ditujukan untuk keperluan belanja modal dan secara umum melalui adanya belanja daerah. Hal tersebut juga bisa diasosiasikan dengan skema PAD karena kemiripannya, dimana contohnya saja adanya peranan PAD adalah untuk keperluan membangun infrastruktur dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Disimpulkan bahwasanya besarnya pembagian dari DAU berbanding lurus dengan adanya peluang dari daerah dalam usaha mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang saat ini diperlukan sebuah pembiayaan yang stabil (Manulubi et al., 2021).

#### **H. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut hasil dari proses penelitian maka diperoleh hasil jika pajak daerah memiliki suatu pengaruh yang positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Kondisi tersebut menjelaskan jika tingginya nilai dari pajak daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh pada aspek dari pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan adanya teori oleh Sollow dan Swan, pajak daerah merupakan bagian dari faktor produksi yaitu akumulasi modal. Apabila terdapat peningkatan penerimaan pajak daerah, output yakni barang serta jasa yang diberikan (PDRB) akan meningkat pula, karena pajak daerah ini dimanfaatkan untuk modal yang bisa menghasilkan output nyata.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan usaha Restoran, Hotel, beserta Hiburan pada daerah memicu munculnya implikasi yang positif, dikarenakan adanya pendapatan yang meningkat bagi masyarakat maka daerah juga diuntungkan atas penerimaan daerah. Tingginya level daya beli di masyarakat menjadikan perputaran dari mata uang di masyarakat semakin meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dari daerah juga semakin pesat.

#### **I. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Merujuk pada hasil dari penelitian maka diperoleh hasil jika komponen retribusi daerah memicu pengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa tingginya retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi dari daerah memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selaras menurut teori Sollow dan Swan dimana retribusi daerah merupakan bagian dari faktor produksi yaitu akumulasi modal. Apabila terdapat peningkatan penerimaan retribusi output yakni barang beserta jasa yang dihasilkan (PDRB) akan meningkat pula, dengan alasan bahwa retribusi daerah ini dipakai menjadi modal yang memicu adanya output tersebut. Namun, teori tersebut nyatanya tidak selaras dengan realita yang muncul di beberapa kabupaten/kota.

Pemasukan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bisa meningkat salah satunya lewat adanya pembayaran dari perorangan maupun badan berkaitan dengan sejumlah produk, jasa, maupun perizinan yang disediakan pihak daerah. Wujud imbal hasil yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah melalui sejumlah pembangunan yang menyasar sarana infrastruktur sehingga didapatkan ekosistem yang tepat untuk menggerakkan roda dari perekonomian. Disimpulkan jika dana atas retribusi dimanfaatkan oleh daerah dalam rangka perbaikan sejumlah sarana fasilitas yang menjadi media pengembangan ekonomi dan secara luas berimplikasi pada tumbuhnya ekonomi di daerah secara cepat.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dilandasi oleh adanya hasil dari analisis pembahasan, diputuskan suatu simpulan yang diambil dari penelitian diantaranya ialah :

1. Realisasi Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2020 terbukti mampu mendorong Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2020. Hasil yang diperoleh relevan atas teori beserta hipotesis yang menjabarkan jika dana alokasi umum, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2020 terbukti mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2020. Hasil yang diperoleh relevan atas teori beserta hipotesis yang menjabarkan jika belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Realisasi Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2020 secara tidak langsung terbukti dapat mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012-2020 melalui Belanja Daerah.
4. Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh hasil sumber daya alam yang melimpah terutama batubara dan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, namun penyediaan infrastruktur cenderung lambat sehingga diperlukan belanja pada sektor infrastruktur agar bisa meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah, sehingga tercipta pemerataan aksesibilitas dan konektivitas antar sentra produksi.

### **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan perbaikan pembangunan di wilayah tersebut dapat dilakukan melalui alokasi anggaran pemerintah pada infrastruktur atau bentuk investasi lainnya yang lebih efisien dan efektif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengoptimalkan pengeluaran, pemerintah perlu pula menggiatkan dan memperketat penarikan pajak

daerah beserta retribusi daerah demi meningkatkan sumber pendanaan daerah untuk mengoptimalkan pengeluaran demi kemajuan daerah. Dibawah ini merupakan sejumlah aspek yang selanjutnya bisa dijalankan sebagai upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi :

1. Dalam aspek infrastruktur, pemerintah hendaknya memanfaatkan Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan optimal melalui belanja daerah berupa pembangunan infrastruktur atau kegiatan investasi lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja baru sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dimana hal ini nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tercipta pemerataan aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke sentra produksi dari dan ke sentra produksi lainnya agar potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan maksimal melalui distribusi yang baik.
2. Dalam aspek pajak daerah beserta retribusi daerah, pemerintah hendaknya melakukan pengawasan ketat atas pemungutan pajak terutama pajak mineral bukan logam dan bebatuan serta retribusi daerah dimana keduanya sudah terbukti berdampak pada pemberian kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terealisasi dengan memperketat penerapan regulasi yang berlaku, memetakan target-target yang hendak dipungut pajak daerah dan retribusi sehingga mengoptimalkan penerimaan dari pajak beserta retribusi daerah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, dan Muhidin. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustina, Melasia dan Indrajaya, I Gusti Bagus. 2013. *Pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali tahun 1993-2012*. Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.3 No.8.
- Adisasmita, R. 2005. *Dasar - Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bank Indonesia. 2018. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur.
- BAPPEDA Kaltim. 2017. *Profil Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. <http://bappedakaltim.com>, diakses tanggal 6 Juli 2018.
- BAPPEDA Kaltim. 2019. *Statistik Kalimantan Tahun 2019*. <https://bappeda.kaltimprov.go.id>, diakses tanggal 30 Desember 2021.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto*. <http://bps.go.id>, diakses tanggal 6 Juli 2018.

- BPS. 2018. *Tinjauan Perekonomian Dunia dan Indonesia*. Jakarta : BPS RI.
- BPS Kaltim. 2018. *Tabel Statistik*. <https://kaltim.bps.go.id>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.
- BPS Republik Indonesia. 2018. *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta: BPS RI.
- DJPk Kemenkeu. 2013. *Realisasi APBD 2014*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2014. *Realisasi APBD 2013*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2015. *Realisasi APBD 2014*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2016. *Dana Alokasi Umum*. <http://djp.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 Agustus 2018.
- DJPk Kemenkeu. 2016. *Realisasi APBD 2015*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2017. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2017. *Realisasi APBD 2016*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2018. *Pajak Daerah*. <http://djp.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 6 Juli 2018.
- DJPk Kemenkeu. 2018. *Realisasi APBD 2017*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPk Kemenkeu. 2018. *Retribusi Daerah*. <http://djp.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 6 Juli 2018.
- Felix, O. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. Journal of Accounting and Taxation Vol. 4 No.1.
- Hasan, T. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh*. Jurnal SAINS Riset, Vol 1 No.1.
- Jumadi, M. Pudjiharjo, Ghozali Maski dan Moh. Khusaini. 2013. *The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java*. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, Vol. 13 (1).
- Khusaini, Moh. 2016. *The role of public sector expenditure on local economic development*. Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 9 (2).
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press.
- Kusnandar, dan Siswanto, D. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

- Mankiw, N. G. 2006. *Makroekonomi (Edisi Keenam)*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mononimbar, R. W., Walewangko, Een N., dan Sumual, J. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.17, No. 2.
- Nuraini, Elva dan Handayani, Dwi. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja daerah Kabupaten Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol.1, No.1.
- Pujiati, Amin. 2007. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Vol. 13, No.2.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS: Statistik Parametrik*. Jakarta: ELex Media Komputindo.
- Setiaji, W., dan Adi, H. P. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X.
- Sharma, B. 2012. *Government Expenditure and Economic Growth in Nepal : a minute analysis*. Journal of Business Management and Accounts, Vol.1 No.4.
- Simanjuntak, Dasan. 2006. *Analisis Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis S2 Program Pascasarjana USU*. Medan: USU.
- Sitepu. 1994. *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Unit Pelayanan Statistika FMIPA Universitas Padjajaran Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 2001. *Statistik Teori dan Aplikasi (Edisi Keenam)*. Jakarta: Erlangga.
- Supranto, J. 2009. *Statistik: Teori dan Aplikasi (Edisi 7 Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2011. *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga.
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah Riset Akuntansi Vol. 1 No.2.
- Widjaja, H. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.